

Pengentasan Kemiskinan Melalui Graduasi Sejahtera Mandiri Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia : Tinjauan Sistematis

Muhammad Yusril Indra Syahputra^{1*}, Oman Sukmana²

^{1,2}Program Magister Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Alamat: Jalan Bandung No. 1, Malang, Indonesia

Korespondensi penulis: indrasyahputra02@webmail.umm.ac.id

Abstract: *Poverty remains one of the main problems in Indonesia that affects various aspects of people's lives. This study analyses poverty alleviation through the Family Hope Program (PKH) with a graduation approach towards independent prosperity. Through a systematic review of 17 journals from 2020 to 2024, it was found that PKH plays an important role in improving the welfare of poor families, especially in access to education and health. While the programme has shown positive results, significant challenges remain, such as economic dependency and limited access to basic services. Factors such as social capital, community support and the role of PKH facilitators prove crucial in achieving self-sufficient graduation. The results of this study suggest the need for a more holistic approach to empower beneficiary families to become more economically independent.*

Keywords: *Poverty, Alleviation, (PKH), Graduation, Prosperous, Mandiri*

Abstrak: Kemiskinan tetap menjadi salah satu permasalahan utama di Indonesia yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penelitian ini menganalisis pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dengan pendekatan graduasi menuju sejahtera mandiri. Melalui tinjauan sistematis terhadap 17 jurnal dari 2020 hingga 2024, ditemukan bahwa PKH berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin, khususnya dalam akses pendidikan dan kesehatan. Meskipun program ini menunjukkan hasil yang positif, tantangan signifikan masih ada, seperti ketergantungan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Faktor-faktor seperti modal sosial, dukungan komunitas, dan peran pendamping PKH terbukti krusial dalam mencapai graduasi sejahtera mandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh untuk memberdayakan keluarga penerima manfaat agar lebih mandiri secara ekonomi.

Kata kunci: Pengentasan, Kemiskinan, (PKH), Graduasi, Sejahtera, Mandiri

1. LATAR BELAKANG

Salah satu permasalahan yang masih dialami oleh negara Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia merupakan isu penting yang membutuhkan penanganan terpadu melalui berbagai sektor pembangunan. Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau kelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Mardikanto, 2019). Menurut Kartasasmita dalam Alpan Disman (2013) kemiskinan itu disebut dengan “accidental poverty” yaitu kemiskinan karena dampaknya dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum (Setyawardani, D. T. R., dkk., 2020).

Tolok ukur tingkat kemiskinan di Indonesia dilihat berdasarkan persentase angka kemiskinan yang dipublikasikan dalam berita resmi Badan Pusat Statistik (Indrasawarni & Darma, 2023). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2024. Persentase penduduk miskin tercatat sebesar 9,03 persen atau setara dengan 25,22 juta orang, lebih rendah dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 9,56 persen atau sekitar 25,9 juta orang. Penurunan ini menunjukkan pengurangan sebesar 0,33 persen poin dalam persentase kemiskinan, dengan jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 0,68 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2024). Kemiskinan dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan structural, dan kesenjangan antar wilayah. Keberadaan kemiskinan menjadi faktor utama yang memicu kesenjangan sosial di masyarakat, yang pada akhirnya melahirkan berbagai masalah sosial lainnya.

Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia dilaksanakan dengan mengambil dua fokus utama yakni membantu mengurangi beban hidup serta upaya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin (Indrasawarni & Darma, 2023). Salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial dilakukan melalui kebijakan perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintahan yang bergerak di bidang sosial. Program PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat. Artinya setiap masyarakat yang menjadi peserta sasaran program memiliki kewajiban yang ditentukan Kementerian Sosial sebagai syarat penerima bantuan (Saragi, S., dkk., 2021). Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia dan memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan catatan mengikuti persyaratan yang diwajibkan (Setyawardani, D. T. R., dkk., 2020).

Program Keluarga Harapan, yang selanjutnya disebut PKH merupakan bantuan tunai bersyarat yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 2007. Tahap awal (uji coba) pelaksanaan PKH tahun 2007, telah diberikan bantuan tunai bersyarat kepada 392.000 RTSM di tujuh provinsi yaitu Gorontalo, Sumatera Barat, OKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2010 tercatat secara nasional keseluruhan penerima manfaat PKH sebanyak 772.830 rumah tangga sangat miskin yang tersebar di 20 Propinsi dari 33 propinsi (Habibullah, H., 2011). Melalui PKH pemerintah berharap dapat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhannya melalui pemberian dana bantuan untuk menyekolahkan anak dan mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak. Secara khusus, tujuan PKH adalah: 1) Meningkatkan akses kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan

peserta PKH, 2) Meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH, 3) Meningkatkan status kesehatan dan gizi peserta (Setyawardani, D. T. R., dkk., 2020).

Pada tahun 2023, graduasi KPM PKH mencapai 120% dari target yang telah ditentukan. Dari jumlah 1.500.000 penerima bantuan yang telah digraduasi, sebanyak 75% atau 1.125.000 penerima bantuan adalah graduasi alami, dan sisanya 25% atau 375.000 penerima bantuan termasuk dalam graduasi sejahtera mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun angka kinerja graduasi terlihat tinggi, terdapat proporsi yang signifikan dari graduasi alami, yang tidak sepenuhnya mencerminkan keberhasilan program dalam mencapai graduasi sejahtera mandiri (Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). PKH diharapkan dapat mereduksi kemiskinan dan kesenjangan melalui serangkaian kegiatan sehingga terjadinya perubahan perilaku yang lebih baik pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan menciptakan kemandirian pada KPM dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya serta berkelanjutan (Fentiny, F., 2021; Habibullah, H., 2011).

Dalam konteks keberhasilan program ini, salah satu aspek penting yang menjadi perhatian adalah pencapaian graduasi kesejahteraan. Graduasi kesejahteraan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) mengacu pada pencapaian kondisi di mana keluarga penerima manfaat (KPM) mampu mandiri secara ekonomi sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan dari program tersebut. Kondisi ini merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Indrasawarni & Darma, 2023). Namun, upaya untuk mencapai graduasi kesejahteraan tidak mudah. Banyak keluarga penerima manfaat menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural maupun kultural. Salah satunya adalah ketergantungan ekonomi, di mana sebagian keluarga kesulitan membangun sumber penghasilan yang stabil dan berkesinambungan (Khoiriyah, N., 2019). Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, juga menjadi salah satu faktor yang memperpanjang lingkaran kemiskinan (Yanti, D. F., & Adi, I. R., 2020). Terakhir, kurangnya modal sosial, seperti minimnya dukungan jaringan sosial, rendahnya kepercayaan antarkomunitas, dan lemahnya norma-norma kolaborasi, turut menghambat KPM dalam memaksimalkan potensi mereka (Lestari dkk., 2019).

Oleh karena itu, pendekatan graduasi kesejahteraan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan ekonomi. Pendekatan yang lebih menyeluruh, seperti penguatan modal sosial, sangat diperlukan. Dengan adanya modal sosial yang kuat, KPM dapat memperluas akses terhadap berbagai sumber daya, mempererat solidaritas komunitas, serta meningkatkan kepercayaan diri untuk hidup mandiri secara finansial (Wediawati dkk., 2021). Modal sosial merupakan salah satu bagian dari dimensi sosial dalam paradigma pembangunan berkelanjutan, yang

mensinergikan tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan (Indrasawarni & Darma, 2023). Modal sosial memiliki tiga unsur utama yaitu nilai/ norma, jaringan dan kepercayaan (Fathy 2019). Penguatan modal sosial dapat menjadi kunci dalam mempercepat proses graduasi kesejahteraan. Masyarakat dengan tingkat modal sosial yang tinggi cenderung lebih mampu mengatasi hambatan ekonomi, mengembangkan potensi diri, dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan dan memperkuat modal sosial dalam desain dan implementasi program-program pemberdayaan ekonomi seperti PKH, agar keberhasilannya lebih berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi KPM (Khoiriyah & Kunarti, 2019; Lestari dkk., 2019).

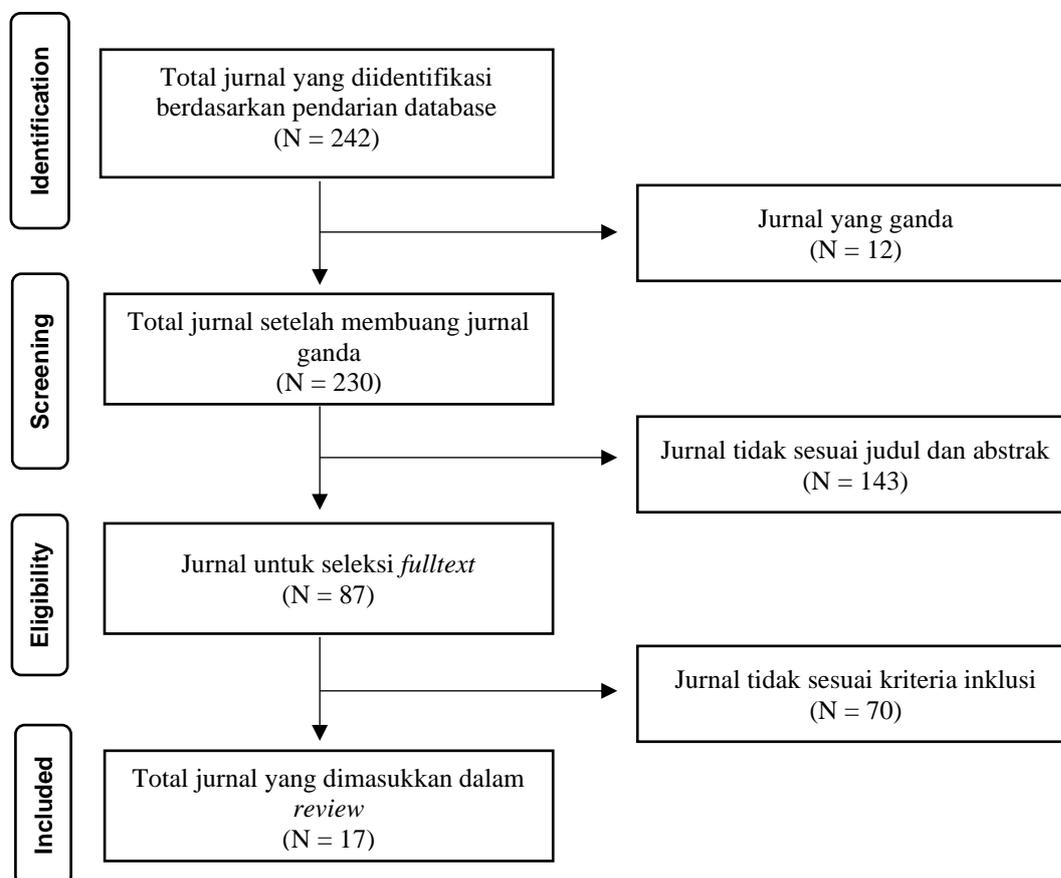
2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *systematic review*, yang disusun berdasarkan panduan PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). Menurut Kitchenham (2004), *Systematic Literature Review* (SLR) adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengulas hasil-hasil penelitian relevan terkait topik tertentu atau fenomena yang menjadi perhatian. Peneliti memilih metode SLR karena ingin menyajikan berbagai penelitian yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan melalui graduasi sejahtera mandiri Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, metode ini membantu peneliti memperluas pemahaman mengenai bidang dan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Proses tinjauan sistematis dilakukan dengan mencari artikel jurnal penelitian yang tersedia di berbagai database elektronik, seperti Google Scholar dan Scopus. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi Pengentasan Kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Graduasi Sejahtera Mandiri. Setelah itu, semua jurnal yang ditemukan diunduh dan diperiksa untuk menghindari duplikasi menggunakan aplikasi Rayyan. Langkah berikutnya adalah menyaring jurnal berdasarkan judul dan abstraknya. Jurnal yang memenuhi kriteria berdasarkan judul dan abstrak kemudian akan diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan relevansinya. Setelah dilakukan seleksi dari 242 jurnal yang ditemukan, hanya terdapat 17 jurnal yang sesuai. Batasan-batasan dalam tinjauan sistematis ini adalah: 1) jurnal membahas tentang pengentasan kemiskinan melalui graduasi sejahtera mandiri program keluarga harapan (PKH), 2) jurnal yang digunakan berbahasa Indonesia dan Inggris, dan 3) Tahun terbit jurnal dari 2020-2024. Jurnal yang sesuai dengan kriteria akan dimasukkan ke dalam pembahasan. Adapun beberapa kriteria jurnal yang tidak akan dipilih yaitu 1) Jurnal tidak berkaitan dengan

pembahasan yang dituju, 2) Penelitian yang metodenya tidak digambarkan dengan jelas, dan 3) Selain itu, artikel seperti buku dan sebagainya tidak diterima.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Grafik PRISMA Alur Seleksi Jurnal

Pembahasan

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah signifikan, dengan banyak keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar akibat ketimpangan sosial dan ekonomi, rendahnya akses pendidikan, serta terbatasnya infrastruktur dan layanan dasar. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, maka sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) (Lestari, R. W., & Talkah, A., 2020). Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan memberikan bantuan sosial bersyarat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (Aeda, N., & Jannah, R., 2022). Meskipun PKH telah menunjukkan hasil positif dalam mengurangi kemiskinan, pelaksanaannya menunjukkan hasil yang beragam dalam menciptakan graduasi kesejahteraan.

Tabel 1. Ringkasan Temuan

No	Author	Metode	Lokasi	Hasil
1.	(Rahma, P., & Ikhwan, I., 2024).	Kualitatif Studi kasus	Kenagarian Sebarang Kenaikan Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.	Penelitian menunjukkan bahwa KPM PKH memilih keluar kepesertaan PKH, yang dikenal sebagai graduasi mandiri, didorong oleh motivasi yang beragam. Motivasi utama berasal dari faktor hygiene, seperti ketidakpuasan terhadap manfaat sosial, rasa malu kepada tetangga, keinginan mengurangi kecemburuan sosial, serta nilai solidaritas. Sebagian kecil KPM juga terpengaruh oleh faktor motivator, seperti mobilitas sosial dan peluang usaha. Dengan itu, graduasi mandiri ini dipengaruhi kultur serta nilai-nilai masyarakat setempat.
2.	(Jannah, M., & Rodiyah, I., 2024).	Kualitatif Deskriptif	Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.	Implementasi PKH di Desa Gemurung belum optimal, yaitu sosialisasi oleh Pendamping PKH masih kurang efektif, terlihat dari adanya penerima manfaat yang menyalahgunakan bantuan, prasarana yang terbatas akibat minimnya dukungan pemerintah dan pengelolaan sumber daya manusia yang kurang maksimal, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Evaluasi pendamping mencakup graduasi peserta PKH yang dianggap tidak memenuhi kriteria.
3.	(Nafisah, M., & Kholifah, E., 2024).	Kualitatif Deskriptif	Desa Cakru, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.	PKH di Desa Cakru sejak 2007 telah memberikan manfaat bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengurangi beban pengeluaran keluarga, khususnya untuk pendidikan dan kesehatan. Meskipun jumlah KPM berkurang dari 238 menjadi 150, efektivitas program masih dipertanyakan. Kurangnya pemahaman KPM tentang tujuan program, dan sasaran penerima tidak tepat karena data yang tidak optimal. Akses pelayanan kesehatan masih menjadi kendala, sementara dukungan dari PKH membantu KPM membiayai pendidikan anak hingga jenjang yang lebih tinggi.
4.	(Nurwan, T. W., & Hasan, H., 2020).	Kualitatif	Di Sijunjung Sumatera Barat	Keterampilan pendamping, seperti memberikan dukungan, memfasilitasi kelompok, membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, dan berbagi pengetahuan, berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan PKH. Hal ini juga mendorong partisipasi KPM dalam pengambilan manfaat dan keterlibatan dalam P2K2. Interaksi langsung antara pendamping dan KPM memungkinkan pendamping lebih memahami kondisi dan kebutuhan

				KPM, pada akhirnya dapat meningkatkan keberhasilan program.
5.	(Prasetyo, K., Nawangsari, E. R., & Sander, J. V. A., 2020).	Kualitatif Deskriptif	Kota Surabaya	Pemberdayaan masyarakat melalui PKH di Kota Surabaya pada tahun 2019 melibatkan 43.808 peserta, namun hanya 146 peserta yang berhasil hidup mandiri. Kemandirian masyarakat diwujudkan melalui tiga pendekatan: menciptakan iklim yang mendukung potensi masyarakat (enabling); memperkuat potensi masyarakat (empowering); dan memberikan perlindungan serta bimbingan untuk menyelesaikan berbagai masalah.
6.	(Darmawan, D., Alamsyah, T. P., & Rosmilawati, I., 2020).	Kualitatif Deskriptif	Kota Serang	Metode Pembelajaran dan Tindakan Partisipatif (PLA) diterapkan untuk memberdayakan KPM, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa agen pendamping PKH berhasil menerapkan metode ini, yang mengakibatkan perubahan positif dalam sikap dan perilaku KPM terhadap diri sendiri dan hubungan sosial mereka. Dengan demikian, PKH berkontribusi pada kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan layanan pendidikan dan kesehatan secara optimal.
7.	(Wediawati, B., Jamal, J., Machpuddin, A., Ratnawati, R. T. S., & Syarif, A., 2021).	Kuantitatif	Kota Jambi	PKH menunjukkan hasil yang beragam dalam lima aspek. Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan komponen PKH berpengaruh signifikan terhadap tingkat graduasi KPM; semakin baik pelaksanaan, semakin tinggi tingkat graduasi. Oleh karena itu, penting untuk memperbaiki komponen yang belum optimal, khususnya dalam pemberdayaan. Disarankan untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi, LSM, dan sektor swasta, serta membangun koordinasi dengan program pemerintah lain dalam pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas wirausaha.
8.	(Junaidi, J., Muhammad Guntur Puboyo, P., & Azis Amriwan, A., 2021).	Kualitatif Studi Kasus	Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu	PKH di Desa Wonodadi memberikan bantuan sosial untuk keluarga miskin, tetapi penentuan penerima tidak sesuai dengan kriteria. Beberapa keluarga yang cukup mapan enggan keluar dari program karena ketergantungan terhadap bantuan. Untuk mengatasi masalah ini, pendamping PKH perlu meningkatkan kesadaran kemandirian dan memberikan pemberdayaan menyeluruh agar penerima dapat mandiri dan mengubah keadaan mereka serta terlihat juga bahwa modal sosial dalam masyarakat tidak tercipta.
9.	(Komalasari, D., & Nugroho, F., 2023).	Kualitatif Deskriptif	Kota Jakarta Timur	Upaya Pendamping Sosial PKH menjadikan KPM graduasi sejahtera mandiri melalui P2K2, dalam

				penyampaian materi dan pemberian motivasi susah dipahami oleh peserta. Keterlibatan Pemerintah Daerah berupa program untuk mempermudah Pendamping Sosial PKH dalam melaksanakan pemberdayaan ekonomi kepada KPM PKH. Kebijakan tersebut berupa program Jakpreneur sebagai pengganti program KUBE APBD. Demikian adanya upaya yang dilakukan dalam hal pemberdayaan ekonomi KPM, agar KPM PH mandiri dan sejahtera, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya didalam keluarga maupun masyarakat.
10.	(Indrasawarni, N. L. P. M., & Darma, G. S., 2023).	Kualitatif Desskriptif	Provinsi Bali (Desa Candikuning dan Sumerta Kaja)	PKH di Provinsi Bali secara garis besar sudah berjalan dengan baik. Keberhasilan pelaksanaan PKH tidak terlepas dari peran pendamping sosial. Modal sosial berkontribusi dalam mewujudkan graduasi sejahtera mandiri PKH. Ini mencakup jaringan, norma, dan kepercayaan yang mendukung kerjasama di antara anggota masyarakat. Di Provinsi Bali, data menunjukkan bahwa meskipun ada banyak KPM, hanya sebagian kecil yang berhasil mencapai graduasi sejahtera mandiri. Kota Denpasar tercatat memiliki jumlah graduasi tertinggi.
11.	(Firmansyah, D., 2023)	Kualitatif Desskriptif	Kelurahan Sawah Baru Kota Tangerang Selatan	Pelaksanaan PKH mencakup berbagai aspek, mulai dari pendampingan, penyaluran bantuan sosial, pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga transformasi kepesertaan. Dalam pelaksanaannya, pendamping sosial PKH aktif dalam sosialisasi mengenai proses graduasi, meskipun sebagian kecil KPM menghadapi tantangan dan perasaan sulit untuk menerima kondisi tersebut. Beberapa KPM melihat graduasi sebagai peluang bagi keluarga miskin lainnya, sementara yang lain merasa cemas karena masih dianggap membutuhkan bantuan. Meskipun ada peningkatan dalam "graduasi", namun kesejahteraan sosial KPM tidak selalu meningkat secara proporsional.

12.	(Utami, A. S., & Nugroho, F., 2023).	Kualitatif Desskriptif	Kecamatan Kuranji, Kota Padang	KPM PKH pasca graduasi mandiri di Kecamatan Kuranji, Kota Padang telah mampu mengembangkan modal sosialnya dengan baik. Dengan Modal Sosial, mereka dapat meningkatkan kompetensi sosialnya. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kemandirian KPM PKH pasca tamat secara mandiri dalam hal ekonomi sehingga mereka memiliki keyakinan untuk melanjutkan hidup secara mandiri dan mengundurkan diri dari kepesertaannya sebagai peserta PKH.
13.	(Usman, M., Mario, M., Rahim, H., Haris, AMA, Ras, A., & Pratama, MR., 2023).	Kualitatif Desskriptif	Kelurahan Tamalanre Kota Makassar	Program penanggulangan kemiskinan seperti PKH berfokus pada pemberdayaan perempuan melalui pendampingan. Dalam proses ini, perempuan sebagai penerima manfaat dapat belajar tentang akses, partisipasi, dan kontrol dalam berbagai bidang, terutama pembangunan. Meskipun PKH memberikan bantuan langsung bersyarat kepada keluarga miskin, program ini belum sepenuhnya menciptakan kemandirian yang signifikan bagi mereka.
14.	(Darwin, D. P., & Azwar, I., 2020)	Kualitatif Desskriptif	Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau	Habitus peserta Program Keluarga Harapan (PKH) berperan penting dalam mendukung graduasi mandiri, tercermin dari sikap gigih, rasa malu, disiplin, hemat, dan jujur. Modal yang dimiliki peserta meliputi modal sosial, ekonomi, budaya, dan simbolik. Arena PKH diwujudkan melalui pertemuan bulanan untuk meningkatkan wawasan, memulai usaha rumah tangga, pemeriksaan kesehatan di Polindes dan Puskesmas, memastikan kehadiran anak di sekolah, menabung untuk usaha, berani berwirausaha, dan memanfaatkan lahan sekitar untuk bercocok tanam.
15.	(Nandyva, A. F., & Widiowati, D., 2024).	Community Work berupa pelatihan kewirausahaan	Desa Rancakalong Sumedang	Pelatihan kewirausahaan dapat mendorong ibu-ibu penerima PKH untuk dapat memulai usahanya sehingga perekonomian keluarga dapat meningkat. Jika perekonomian keluarga telah meningkat, maka KPM PKH tersebut dapat melakukan graduasi sehingga dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi tingkat pengangguran.
16.	(Rizqi, P. D. S., Suharso, P., Hartanto, W., & Sedyati, R. N., 2021)	Kualitatif Desskriptif	Kecamatan Sumber jambe, Kabupaten Jember	Pelaksanaan program E-Warong KUBE PKH di Kabupaten Jember telah berhasil, terbukti dengan penerimaan bantuan sosial non tunai oleh KPM. Di Desa Pringgondani, masyarakat mulai membangun industri rumahan untuk mengembangkan jiwa wirausaha. Program ini memaksimalkan sumber

				daya manusia dan pendanaan, serta melakukan komunikasi rutin setiap bulan untuk membahas perkembangan dan evaluasi. E-Warong juga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui promosi produk yang dihasilkan.
17.	(Sariningsih, Y., Purwanti, Y., & Dinihayati, E., 2021)	Kualitatif Desskriptif	Provinsi Jawa Barat	Pengembangan usaha melalui bank sampah dapat terintegrasi dengan e-warong KUBE, memberikan keuntungan tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga bahan pangan seperti gula, sabun, minyak, dan beras. Implementasi e-warong dalam usaha ritel didampingi oleh pendamping sosial, termasuk pendamping PKH dan TKSK. Pendamping PKH berperan lebih aktif sebagai broker dan fasilitator dalam pemberdayaan sosial ekonomi e-warong, karena mereka melakukan pendampingan yang lebih intensif. Sementara itu, TKSK lebih fokus pada penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan pelatihan untuk pengembangan usaha KUBE.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan hasil yang beragam dalam menciptakan graduasi kesejahteraan. Sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mampu mencapai graduasi mandiri, terutama yang didorong oleh motivasi sosial seperti rasa malu, solidaritas, dan keinginan mengurangi kecemburuan sosial. Namun, jumlah KPM yang berhasil masih relatif kecil. Sebagai contoh, di Kabupaten Pasaman Barat, faktor-faktor seperti mobilitas sosial dan peluang usaha menjadi pemicu keberhasilan graduasi mandiri (Rahma & Ikhwan, 2024). Di sisi lain, masih banyak KPM yang bergantung pada bantuan sosial akibat belum tercapainya kemandirian ekonomi (Prasetyo dkk., 2020).

Berbagai kendala ditemukan dalam implementasi PKH, yang menghambat optimalisasi program. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya fasilitas pendukung, seperti sarana dan prasarana untuk sosialisasi program. Minimnya dukungan pemerintah dalam penyediaan fasilitas tersebut menjadi tantangan signifikan (Jannah & Rodiyah, 2024). Selain itu, pengelolaan data penerima manfaat sering kali tidak optimal, mengakibatkan banyaknya penerima yang tidak memenuhi kriteria tetapi tetap menerima bantuan (Junaidi dkk., 2021). Pendamping PKH juga menghadapi tantangan besar, terutama ketika mereka bukan berasal dari daerah setempat. Hal ini mengurangi efektivitas pemantauan dan pendampingan terhadap KPM (Jannah & Rodiyah, 2024).

Pendamping PKH memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan program, termasuk dalam mendorong KPM menuju graduasi mandiri. Pendamping yang aktif dan terlatih mampu memberikan bimbingan yang efektif melalui program seperti P2K2, yang terbukti meningkatkan pemahaman dan kemandirian KPM (Komalasari & Nugroho, 2023). Namun, beberapa pendamping mengalami keterbatasan dalam menjalankan peran mereka, terutama ketika mereka tidak mengenal konteks sosial KPM karena bukan berasal dari wilayah tersebut (Nurwan & Hasan, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa aspek kedekatan sosial dan pemahaman budaya lokal sangat penting dalam pendampingan yang efektif.

Upaya pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu fokus utama dalam PKH untuk mencapai graduasi mandiri. Program pelatihan kewirausahaan, misalnya, telah berhasil mendorong ibu-ibu penerima PKH untuk memulai usaha kecil yang dapat meningkatkan perekonomian keluarga (Nandyva & Widiowati, 2024). Selain itu, program E-Warong dan KUBE menyediakan platform bagi KPM untuk mengembangkan keterampilan ekonomi dan memanfaatkan sumber daya yang ada (Rizqi dkk., 2021; Sariningsih dkk., 2021). Meskipun demikian, pelaksanaan program-program ini masih memerlukan perbaikan, terutama dalam hal koordinasi dan keberlanjutan. PKH juga memberikan dampak signifikan di luar aspek ekonomi, seperti pembentukan modal sosial di kalangan masyarakat. Dukungan komunitas yang kuat mampu membantu KPM dalam proses pengentasan kemiskinan. Modal sosial, yang meliputi jaringan, norma, dan kepercayaan, terbukti berkontribusi pada graduasi kesejahteraan mandiri di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Bali (Indrasawarni & Darma, 2023). Dukungan moral dan motivasi dari pendamping juga menjadi faktor penting yang mendorong keberhasilan program.

PKH secara umum berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keluarga, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Di Desa Cakru, Kabupaten Jember, misalnya, program ini membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga dan memungkinkan anak-anak mendapatkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi (Nafisah & Kholifah, 2024). Namun, kontribusi PKH terhadap kesejahteraan jangka panjang masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. Tantangan utama adalah memastikan bahwa setiap keluarga yang keluar dari program benar-benar mencapai kemandirian ekonomi dan sosial. Monitoring dan evaluasi (Moneva) yang efektif merupakan elemen penting untuk memastikan keberhasilan PKH. Evaluasi rutin diperlukan untuk menilai pencapaian graduasi mandiri dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi KPM. Sebagai contoh, di Kota Surabaya, evaluasi dilakukan dengan pendekatan holistik yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi

(Prasetyo dkk., 2020). Dengan adanya Moneva yang terencana dan terarah, pemerintah dapat terus memperbaiki program ini untuk mencapai tujuan yang lebih optimal.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia memiliki potensi besar sebagai alat dalam melakukan pengentasan kemiskinan. Namun, program ini masih menghadapi tantangan signifikan yang menghambat efektivitasnya (Mohamad, S., dkk., 2024). Kendala yang dihadapi meliputi ketidakakuratan data penerima, komunikasi yang buruk antara pendamping dan penerima, minimnya pendampingan, serta penyalahgunaan dana bantuan. Selain itu, keterbatasan sarana, rendahnya partisipasi penerima, dan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi lokal juga turut menghambat keberhasilan program.

Dalam mencapai peningkatan efektivitas PKH, perlu dilakukan perbaikan pada sistem pendataan dan peningkatan kualitas pendampingan serta pemerintah harus memberikan perhatian penuh terhadap program seperti ini. Penguatan integrasi antarprogram juga merupakan langkah penting yang harus diambil. Dengan mempelajari pendekatan terintegrasi yang diterapkan oleh negara-negara maju, kita dapat mengadopsi praktik terbaik yang relevan. Hal ini akan menjadi jembatan untuk mengeksplorasi inovasi baru dan menciptakan konsistensi dalam pelaksanaan PKH di masyarakat Indonesia. Dengan langkah-langkah ini, tata kelola Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat diperbaiki, sehingga menghasilkan dampak yang lebih berkelanjutan sesuai dengan tujuan pengentasan kemiskinan yang dicitakan oleh segenap masyarakat Indonesia.

4. KESIMPULAN

Program Keluarga Harapan (PKH) telah berkontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia, terutama bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sering kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Meskipun PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui bantuan tunai bersyarat, banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum mampu mencapai kemandirian ekonomi dan tetap bergantung pada bantuan. Kendala dalam implementasi, seperti kurangnya fasilitas pendukung dan pengelolaan data yang tidak optimal, menghambat efektivitas program. Peran pendamping PKH penting dalam mendorong graduasi mandiri, namun banyak yang tidak memahami konteks lokal. Modal sosial dan dukungan komunitas juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang lebih menyeluruh untuk memperkuat modal sosial dan meningkatkan kolaborasi antara pemangku kepentingan. Monitoring yang baik diperlukan untuk memastikan KPM yang keluar dari program benar-benar mandiri secara ekonomi.

DAFTAR REFERENSI

- Aeda, N., & Jannah, R. (2022). Implementasi dan Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Studi di Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Journal of Economics and Business*, 8(1), 165-186.
- Alpan Disman. 2013. Masyarakat Miskin Di Kelurahan Maharatu Rw 09 Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Universitas Riau.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Persentase dan jumlah penduduk miskin, Maret 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Diakses dari <https://www.bps.go.id>.
- Darmawan, D., Alamsyah, T. P., & Rosmilawati, I. (2020). Participatory Learning and Action untuk Menumbuhkan Quality of Life pada Kelompok Keluarga Harapan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 160-169.
- Darwin, D. P., & Azwar, I. (2020). Social Practice Participants in the Independent Graduation in the Family Hope Program (PKH). *International Journal of Science and Society*, 2(2).
- Fathy, Rusydan. 2019. "Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas Dan Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 6(1):1-17. doi: 10.22146/jpsv6i1.47463.
- Fentiny, F. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kota Tangerang Selatan. *Pekerjaan Sosial*, 20(2), 178-196.
- Firmansyah, D. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sawah Baru Kota Tangerang Selatan. *Sosial Budaya*, 20(2), 125-138.
- Habibullah, H. (2011). Peran Pendamping Pada Program Keluarga Harapandi Kabupaten Karawang. *Sosio Informa*, 16(2).
- Indrasawarni, N. L. P. M., & Darma, G. S. (2023). Modal Sosial dalam Graduasi Sejahtera Mandiri Program Keluarga Harapan di Provinsi Bali. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 10(1), 35-68.
- Jannah, M., & Rodiyah, I. (2024). Implementation of Family Hope Program (PKH). *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 25(1), 10-21070.
- Junaidi, J., Muhammad Guntur Puboyo, P., & Azis Amriwan, A. (2021). Transformasi Pengentasan Kemiskinan Keluarga Fakir Miskin Penerima Program Keluarga Harapan (Studi di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu), 12(2), 185-201.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). Graduasi Keluarga Penerima Manfaat dari Bantuan Sosial.
- Khoiriyah, N. (2019). Graduasi Mandiri: Bentuk Keberdayaan Penerima Manfaat (Kpm) Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kabupaten Pati. *KOMUNITAS*, 10(2), 143-156.

- Lestari, R. W., & Talkah, A. (2020). Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Pkh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pkh Di Kecamatan Pangungrejo Kabupaten Blitar. *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(2), 229-241.
- Lestari, W., Kartono, D. T., Demartoto, A., & Setiyawan, K. B. (2019). The Empowerment of Households towards Independence through Social Capital in Program Keluarga Harapan (PKH): Pemberdayaan Rumah Tangga menuju Kemandirian melalui Modal Sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH). *Society*, 7(2), 268-280.
- Mardikanto. (2019). Panduan pelaksanaan Gerakan satu perangkat daerah satu desa dampingan menuju desa lebih Sejahtera. *Jurnal Ekonomi*.
- Mohamad, S., Saleh, G. S., & Umuri, H. (2024). Implementation of the UMKM Program in Poverty Alleviation di Desa Padengo Kabupaten Pohuwato. *PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN*, 3(2), 117-140.
- Nafisah, M., & Kholifah, E. (2024). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember). *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(3), 15-15.
- Nandyva, A. F., & Widiowati, D. (2024). Desain Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Digital untuk Akselerasi Graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Desa Rancakalong Sumedang. *Jurnal Pengabdian Tri Bhakti*, 6(1), 1-6.
- Nurwan, T. W., & Hasan, H. (2020). Keberhasilan PKH ditinjau dalam kaitannya dengan keterampilan pendamping dan partisipasi KPM: Studi di Sijunjung Sumatera Barat. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 10(1), 1-13.
- Prasetyo, K., Nawangsari, E. R., & Sander, J. V. A. (2020). Model Kemandirian Masyarakat dalam Upaya Pemberdayaan Sosial melalui Program PKH di Kota Surabaya. *Public Administration Journal of Research*, 2(4).
- Rahma, P., & Ikhwan, I. (2024). Motivasi KPM PKH Melakukan Graduasi Mandiri di Kenagarian Seberang Kenaikan Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Perspektif*, 7(1), 55-65.
- Rizqi, P. D. S., Suharso, P., Hartanto, W., & Sedyati, R. N. (2021, May). The Implementation of Electronic Warong Program of Family Hope Program Joint Venture (E-Warong Kube PKH). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 747, No. 1, p. 012099). IOP Publishing.
- Rodiyah, I. (2024). Implementation of Family Hope Program (PKH). *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 25(1), 10-21070.
- Saragi, S., Batoebara, M. U., & Arma, N. A. (2021). Analisis pelaksanaan program keluarga harapan (pkh) di desa kota rantang kecamatan hamparan perak. *Publik*, 8(1), 1-10.
- Sariningsih, Y., Purwanti, Y., & Dinihayati, E. (2021, April). Waste bank as business development solution in e-warong KUBE PKH. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 737, No. 1, p. 012062). IOP Publishing.

- Setyawardani, D. T. R., Paat, C. J., & Lesawengen, L. (2020). Dampak bantuan PKH terhadap masyarakat miskin di kelurahan Bumi Nyiur kecamatan Wanea kota Manado. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*.
- Usman, M., Mario, M., Rahim, H., Haris, AMA, Ras, A., & Pratama, MR (2023). Kemandirian Perempuan Sebagai Perwujudan Program Keluarga Harapan di Desa Tamalanrea. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 16 (1), 56-68.
- Utami, A. S., & Nugroho, F. (2023). Social Capital of KPM PKH after Independent Graduation in Improving Social competence in Kuranji District, Padang City, Indonesia. *Social Capital*, 6(7).
- Wedawati, B., Jamal, J., Machpuddin, A., Ratnawati, R. T. S., & Syarif, A. (2021). Efektifitas Skema Graduasi Program Keluarga Harapan: Studi Pada Keluarga Penerima Manfaat di Kota Jambi. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 1(1), 57-68.
- Yanti, D. F., & Adi, I. R. (2020). Analisis Process Terhadap Strategi Graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Cianjur Dalam Kerangka Result-Based Management. *Empati Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9(2), 147-163.